BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Dalam dekade 1945-1947 karena keadan politik, Djawatan Kehutanan hanya dapat menjalankan tugas di Sumatera dan Jawa saja dengan susunan organisasi yang sangat sederhana.

Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada waktu itu adalah R.O Nurhadi yang diangkat sebagai Inspektur Kehutanan Bagian I Bandung dengan surat ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran Tanggal 24 Oktober 1945 No. 735/A/ Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok Djawatan Kehutanan adalah turut mempertahankan *de facto* Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintahan sipil lainnya.

Tahun 1947 di Jawa Barat terbentuk Negara Pasundan, dan Instansi kehutan berubah menjadi **De Dienst van Boswezen van Negara Pasundan** yang dipimpin oleh Ir.C.Y.Moel sampai dengan 1949. Pada tahun itu juga kehutanan mulai disusun secara federatif. Dan pada pertengahan tahunnya tahunnya dibentuk suatu bagian yang disebut **Planologi Kehutanan** yang terpisah dari pengelolaan, dipimpin oleh R.H. Odang Prawiradiredja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1951 terbit Surat Keputusan Jawatan Kehutanan tertanggal 17 Nopember 1951 Nomor 4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi di Indonesia dimana Planologi Kehutanan Jawa

Barat ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Oesman Nandika.

Peraturan Pemerintah Nomor: 20/ 1952 menetapkan Kehutanan di Jawa/ Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan Bagian I. Bertindak sebagai inspektur waktu itu adalah R.Keosnowarso. tetapi tidak lama kemudian diganti M.Saroso.

Pada tahun 1953, Kepala Jawatan Kehutanan dengan Surat Keputusan Tanggal 1 Oktober 1953 Nomor 17777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi.

Oleh Karena pada tahun 1954 M.Saroso menininggal dunia, R.Oesman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Jawa Barat dialih tugaskan menjadi Inspektur Jawatan Kehutanan Bagian I Jawa Barat dan Kepala Brigade I Planologi Kehutan dijabat oleh Adang Durachman.

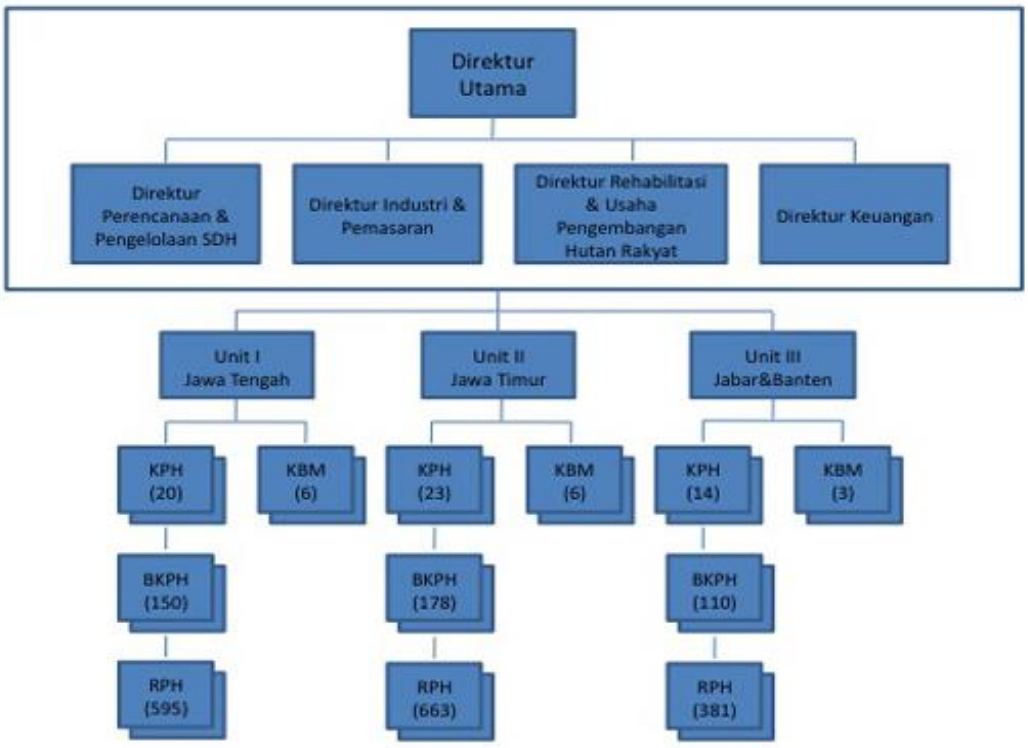
Pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 64/1975 menetapkan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat pada daerah-daerah Swatantra Tingkat I. Maka berubahlah status Inspeksi Kehutanan Bagian I Jawa Barat menjadi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat. R.Oesman Nandika selaku Kepala Dinas pertama menduduki jabatan itu sampai masa pensiunnya tahun 1964, digantikan oleh Adang Durahman sampai tahun 1971.

Pada tahun 1971 sampai dengan Mei 1974 Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Ir. Sulaeman Partadisastra yang selanjutnya

digantikan oleh Rd.Usman Mu'min BSc.F. Sebagai Pejabat Kepala Dinas definitif sampai akhir Pebuari 1978.

Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat selama periode 1964-1961 mengalami dua kali pergantian pimpinan, yaitu Ir. Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Rifa'i yang selanjutnya digantikan oleh Ir.M.Simbolon pada awal tahun 1974.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1 *Struktur Perusahaan*

3.3 Deskripsi Kerja

1. Direktur Utama
    a. Memimpin seluruh dewan
    b. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi
    c. Memimpin rapat umum
    d. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
2. Direktur Perencanaan dan Pengolahan SDH
    a. Memimpin dalam perencenaan dan pengolahan di organisasi
    b. Bertindak sebagai perwakilan organisasi di bidang perencenaan dan pengolahan
    c. Menawarkan visi dan imajinasi dalam perencenaan dan pengolahan
3. Direktur Industri dan Pemasaran
    a. Tugasnya mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran
    b. Bertindak mengawasi promosi dan industri
4. Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat
    a. Memimpin dibagian rehabilitasi dan pengembangan hutan rakyat
    b. Bertindak mengawasi rehabilitasi dan pengembangan hutan rakyat
5. Direktur Keuangan
    a. Mengkoordinir perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran perusahaan dengan bekerjasama dengan direksi lainnya

b. Membangun sinergi dan berusaha mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan
c. Memastikan ketersediaan dana operasional yang dibutuhkan oleh perusahan untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan melakukan koordinasi erat